

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi konsumen atas produk bahan bakar Pertamax yang disediakan oleh PT Pertamina Patra Niaga. Permasalahan utama yang diangkat adalah adanya potensi kerugian konsumen akibat perbedaan kualitas produk, serta kurangnya transparansi dalam proses distribusi. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai pelanggaran hak-hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kajian dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta peraturan teknis terkait standar mutu bahan bakar minyak. Selain itu, penelitian juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal hukum, serta pandangan ahli yang berhubungan dengan perlindungan konsumen. Melalui analisis normatif, penelitian ini mengidentifikasi hak-hak konsumen yang dilanggar, ruang lingkup perlindungan hukum, serta kendala dalam implementasi regulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum bagi konsumen telah tersedia, namun penerapannya belum optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan peran pemerintah dalam pengawasan, transparansi informasi, serta penyediaan mekanisme ganti rugi yang lebih efektif untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi konsumen terhadap kasus BBM Pertamax yang tidak sesuai standar dan mutu produk yang berlaku .

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Konsumen, Pertamax, Pertamina Patra Niaga, Standar mutu

ABSTRACT

This study examines legal protection for consumers of Pertamina fuel products provided by PT Pertamina Patra Niaga. The main issues raised are the potential for consumer losses due to differences in product quality and the lack of transparency in the distribution process. This situation raises legal issues regarding violations of consumer rights under Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

The study was conducted by examining relevant laws and regulations, specifically Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas, and technical regulations related to fuel quality standards. Furthermore, the study utilized secondary legal materials in the form of literature, legal journals, and expert opinions related to consumer protection. Through normative analysis, this study identified violated consumer rights, the scope of legal protection, and obstacles to regulatory implementation.

The results indicate that legal protection for consumers is normatively available, but its implementation is not yet optimal. Therefore, it is necessary to increase the government's role in supervision, information transparency, and the provision of more effective compensation mechanisms to ensure legal certainty and justice for consumers in cases of Pertamina fuel that does not meet applicable product standards and quality.

Keywords: *Legal protection, Consumers, Pertamina, Pertamina Patra Niaga, Quality standards*